



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1995-2008

SKRIPSI



**EKHO ADEALTO OPERO
05 151 060**

**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

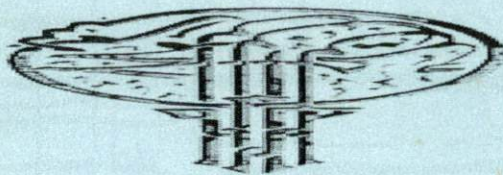
Setetes keringat orang tua mempunyai banyak makna,
 Ada do'a, kasih sayang, kelezmbutan, harapan dan cinta.
 Sepenggal harapan akan tercipta dalam setiap tutur kata yang
 Terucap dan sebuah harapan akan terlintas dalam do'a yang diucapkan.
 "Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta dan adiknya tersayang"

Alhamdulillah
 Sekeping cita-cita telah kirai
 Setitik kebahagiaan karenanya telah kurnikmati
 Sering dengan rasa syukurku kepada-Mu ya Allah
 Atas apa yang telah Engkau lmpahkan
 Sungguh kurnia-Mu itu tak terhingga
 Terimakasih ya Allah

(HR. Baihaqi)
 "Orang paling utama di antara manusia adalah mukmin yang mempunyai ilmu,
 dirnana kaku dibutuhkan orang dia membawa manfaat atau memberi
 petunjuk dan dikala sedang tidak dibutuhkan dia memperkaya
 atau menambah sendiri pengetahuannya"

(Q.S. Al-Baqarah : 269)
 "Allah memberikan hikmah ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendaki-Nya
 barang siapa yang mendapat hikmah-Mu sesungguhnya ia telah menciptakan
 kebajikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
 kecuali orang-orang yang berakal"

LEMBARAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahhim

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis juga menghadapi berbagai kendala. Semua kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan tersebut, yaitu dari :

1. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
2. Bapak Dr.Hefrizal Handra, M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi petunjuk, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
4. Bapak Drs.H.Masrizal, M.Soc. Sc dan Drs.Zulkarnain Ras, MSi selaku tim pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof.Dr.Nasri Bachtiar, SE.MS selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan saran dan kritik serta motivasi selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

6. Seluruh dosen yang mengabdikan pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Bapak dan Ibu karyawan biro Jurusan Ilmu Ekonomi dan pegawai Dekanat Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses kelancaran administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
8. Kedua orang tuaku tercinta yang begitu sabar membesarkan dan membimbing penulis serta memberikan semangat, dorongan dan doa kepada penulis serta kepada adikku Felendro (Palen) ayo semangat skripsinya, juga untuk Duli Nofita yang memberikan semangat masukan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini hingga menjadi seorang sarjana yang selalu berada dalam kecintaan dan kasih sayang. Semoga kita selalu berada di bawah naungan ridho illahi, Amin;
9. Seluruh teman – teman Jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2005, terutama Fajar Martha Nasution, SE yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya dalam penulisan skripsi ini, Tenkyu Bro! dan Yudi Hardian SE yang sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar SE, kojo lai ndan!!Kakak-kakakku, serta adik-adik satu jurusan, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, sukses juga buat kalian semua.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga skripsi ini dapat lebih bermanfaat.

Padang, 3 Mei 2011

Penulis

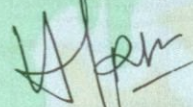
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **Ekho Adealto Opero**
No. BP : 05 151 060
Jenjang Pendidikan : S 1 (Strata Satu)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul skripsi : Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008

Telah disajikan dalam seminar hasil jurusan ilmu ekonomi dan disetujui oleh pembimbing skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Dr. H. Hefrizal Handra, M. Soc. Sc
NIP. 196510201993021001

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, MA
NIP. 19541009198021001

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec. DEA, Ing
NIP. 130812952



No. Alumni Universitas

**Ekho Adealto
Opero**

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 21 Maret 1987 b). Nama Orang Tua : Romainoor dan Sudriati Nurdin c).Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 05151060 f).Tgl lulus: 6 Mei 2011 g).Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 2,96 i).Lama Studi: 5 Tahun 8 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. KH. Dewantoro No. 213, Tanah Garam, Solok

Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008

Skripsi S1 Oleh: Ekho Adealto Opero

Pembimbing: Dr. Hefrizal Handra, M.Soc. SC

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Propinsi Sumatera Barat serta menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data time series, yang diambil dari BPS Sumatera Barat dan situs resmi keuangan daerah Republik Indonesia selama periode penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode Ordinary Least Squares. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa PDRB Perkapita dan aglomerasi berhubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat, sedangkan investasi serta dummy time otonomi daerah berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Ketimpangan pembangunan pada periode 1995-2008 dapat dikatakan cenderung turun tiap tahunnya dan dapat dikatakan distribusi pembangunan hampir merata di seluruh daerah Sumatera Barat.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 6 Mei 2011.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tanda Tangan | | | |
| Nama Terang | Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc | Drs. H. Masrizal, M.Soc.Sc | Drs. Zulkarnain Ras, MSi |

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec. DEA, Ing

NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Petugas Fakultas / Universitas | |
| No. Alumni Fakultas : | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas : | Nama | Tanda Tangan |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Landasan Teori | 13 |
| 2.1.1 Pembangunan Ekonomi | 13 |
| 2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah | 14 |
| 2.1.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi | 16 |
| 2.1.3.1 Model Pertumbuhan Neo-Klasik | 16 |
| 2.1.3.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik | 18 |
| 2.1.3.3 Aglomerasi | 20 |
| 2.1.3.4 Hipotesis Kuznetz | 21 |
| 2.1.4 Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 24 |
| 2.1.4.1 Indeks Williamson | 26 |
| 2.1.4.2 Konsep PDRB per Kapita Relatif | 26 |
| 2.1.5 Hubungan antara PDRB Per kapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 27 |
| 2.1.6 Hubungan Antara Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 28 |
| 2.1.7 Hubungan Antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 29 |
| 2.1.8 Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dengan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 30 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis | 34 |
| 2.4 Hipotesis | 37 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 38 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4 Metode Analisis | 42 |
| 3.4.1 Analisis Regresi | 42 |
| 3.4.2 Estimasi Model Regresi | 42 |
| 3.4.3 Pengujian Statistik | 44 |
| 3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 44 |
| 3.4.3.2 Uji T-statistik | 45 |
| 3.4.3.3 Uji F-statistik | 45 |
| 3.4.3.4 Uji Durbin-Watson (D-W) | 46 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1 Analisis Deskriptif | 47 |
| 4.1.1 Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 47 |
| 4.1.2 PDRB Perkapita | 50 |
| 4.1.3 Investasi | 53 |
| 4.1.4 Aglomerasi | 54 |
| 4.2 Analisis Regresi | 56 |
| 4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2) | 57 |
| 4.2.2 Uji F-test statistik | 57 |
| 4.2.3 Uji T-test statistik | 58 |
| 4.2.4 PDRB Perkapita | 59 |
| 4.2.5 Kondisi Investasi | 59 |
| 4.2.6 Aglomerasi | 60 |
| 4.2.7 Dummy Time Otonomi Daerah | 60 |
| 4.3 Uji Asumsi Klasik | 61 |
| 4.3.1 Uji Multikolinearitas | 61 |
| 4.3.2 Uji Heteroskedastisitas | 62 |
| 4.3.3 Data Terdistribusi Normal | 63 |
| 4.3.4 Uji Auto Kolerasi | 64 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| 5.1 Kesimpulan | 66 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 68 |
| 5.3 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008 | 49 |
| Tabel 4.2 | Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita dan PDRB Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008 Berdasarkan Harga Konstan 2000 | 51 |
| Tabel 4.3 | Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Propinsi Sumatera Barat Berdasarkan Realisasi Tahun 1995-2008 | 53 |
| Tabel 4.4 | Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008 | 55 |
| Tabel 4.5 | Uji t-statistic | 58 |
| Tabel 4.6 | Uji Multikolinearitas | 62 |
| Tabel 4.7 | Uji Heteroskedastisitas | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008 | 5 |
| Gambar 2.1 | Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson Dengan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2000 | 23 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran Teoritis | 36 |
| Gambar 4.1 | PDRB Per Kapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2008 | 52 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara Dunia Ketiga atau yang lebih sering disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara-negara yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pembangunan ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di Negara sedang berkembang ialah keinginan dari Negara Sedang Berkembang (NSB) untuk dapat mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli, 2008).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Negara Indonesia terdiri atas 33 Propinsi memiliki latar belakang

perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap propinsi.

Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa propinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (spread effect). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh propinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Ketimpangan wilayah (regional disparity) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju.

Ketidakterrataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Alisjahbana (2005) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya propinsi-propinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antardaerah yang lebih lebar. Pada tingkat Propinsi, masih terjadi ketimpangan selama tahun 1990an sampai 2000.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi, sebab ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan secara keseluruhan di dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih kecil lagi dari pendapatan marginal mereka (Todaro, 2006).

Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Di mana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah yang makmur. Prof. Simon Kuznets mengemukakan enam karakter atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut (Todaro, 2004) :

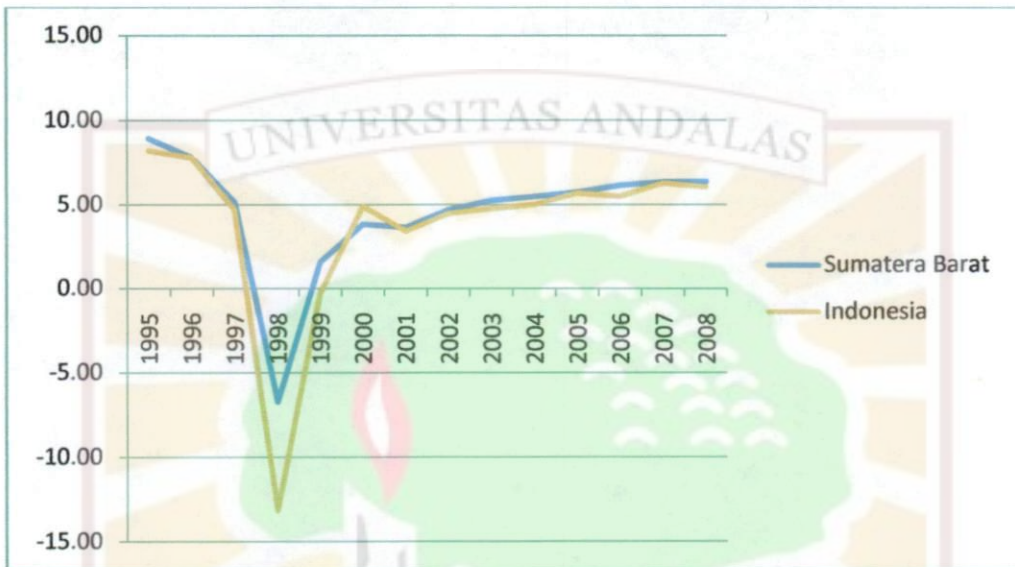
1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Simon Kuznets dalam Todaro (2006) juga mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan pun akan membaik. Hal ini sebagian besar dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznets “U-Terbalik”

Gambar 1.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Propinsi Sumatera Barat Tahun
1995-2008**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 menggambarkan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 1995-2008. Sumatera Barat memiliki laju pertumbuhan yang cenderung hampir sama dengan laju pertumbuhan nasional. Pada tahun 1998 dan 1999 laju pertumbuhan wilayah propinsi Sumatera Barat ini mengalami penurunan cukup tinggi hingga angka $-6,73\%$ dan $1,59\%$ dikarenakan krisis ekonomi yang dialami Indonesia dan juga berdampak pada wilayah-wilayah di dalamnya termasuk Sumatera Barat. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kembali meningkat hingga tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang meningkat tersebut menunjukkan Sumatera Barat sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik.

Akan tetapi hal ini tidak serta mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di Sumatera Barat terjadi secara merata. Terlebih dahulu perlu diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena kontribusi seluruh masyarakat atau hanya sebagian masyarakat saja. Untuk itu agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana nantinya dapat mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, perlu diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi seluruh masyarakat.

Ketimpangan yang terjadi di Sumatera Barat ini disebabkan oleh banyak faktor. Seperti pada teori Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan yang lebih tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap teralantar. Menurut Myrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi.

Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di

wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1990). Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Disisi lain seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah akan menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan. Selain investasi, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Disamping itu, penetapan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004).

Penetapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian

direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sjafrizal (2008) mengemukakan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergali. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk "*Block Grant*" berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan demikian diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi (Sjafrizal, 2008).

Dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini peneliti mengambil judul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1995-2008”** untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Sumatera Barat dan pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. PDRB per kapita menunjukkan tingkat pembangunan suatu wilayah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita Sumatera Barat masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di Sumatera Barat belum terlaksana secara merata. Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar antara wilayah satu dengan lainnya.

Disamping itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya aglomerasi dan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Dari penjelasan sebelumnya maka pertanyaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

- a. Seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat tahun 1995-2008?
- b. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, serta dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan di Propinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat.
- b. Menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. **Pengambil Kebijakan**

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat mengenai keadaan obyek penelitian, kondisi ekonomi, analisis deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis ketimpangan pembangunan wilayah, dan analisis regresi .

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas dasar penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1985), walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat, Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto* atau GDP). Namun demikian cara tersebut memiliki kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada saat terjadi pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi pula pertambahan penduduk.

Oleh karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan

tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi. Perbedaan yang timbul ini menyebabkan beberapa ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Para ekonom menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai (Arsyad, 1997) :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diberengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di Negara sedang berkembang (Arsyad, 1997).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu

proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 1997). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 1997).

Menurut Arsyad (1997) keadaan sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-

daerah yang terbelakang meupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.1.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

2.1.3.1 Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama Model Pertumbuhan Neo-Klasik (Boediono, 1992). Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model neo-klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978) dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis (Sjafrizal, 2008) :

$$Y = A K^\alpha L^\beta, \alpha + \beta = 1 \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga kerja. Karena analisa mnyangkut pertumbuhan maka semua variabel adalah fungsi waktu (t). Dengan mengambil turunan matematika persamaan (2.1) terhadap variabel t diperoleh :

$$y = a + \alpha k + (1 - \alpha) l \dots\dots\dots(2.2)$$

dimana $y = dY/dt$ menunjukkan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi), $a = dA/dt$ menunjukkan perubahan teknologi produksi (secara netral), $k = dK/dt$ menunjukkan penambahan modal (investasi) dan $l = dL/dt$ penambahan jumlah dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya, bila aspek daerah dimasukan ke dalam analisa ini, maka peningkatan modal di suatu daerah tidak hanya berasal dari tabungan di daerah itu saja, tetapi berasal juga dari modal yang masuk dari luar daerah. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$k_i = (s_i/v_i) + \sum_{j=1}^n k_{ji} \dots\dots\dots(2.3)$$

dimana s_i adalah *Marginal Propensity to Save* (MPS) di daerah i, v_i adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) daerah i. Sedangkan k_{ji} adalah jumlah modal yang masuk dari daerah lain ke daerah i. Sama halnya dengan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja daerah i tidak saja disebabkan kerana penambahan penduduk daerah yang bersangkutan saja, tetapi juga karena arus perpindahan penduduk masuk (*immigration*) ke daerah yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$l_i = n_i + \sum_{j=1}^n m_{ji} \dots\dots\dots(2.4)$$

dimana n_i merupakan pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan, m_{ji} adalah penduduk yang masuk (*immigration*) ke daerah i yang datang dari daerah lainnya j .

Perpindahan modal (k_{ji}) dari daerah j ke daerah i terutama oleh tingkat pengembalian modal, r , yang tinggi di daerah i dibandingkan dengan daerah j . Demikian juga dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena ada perbedaan tingkat upah, w . Berdasarkan hal ini maka dapat ditulis :

$$k_{ji} = f_k (r_i - r_j) \dots\dots\dots(2.5)$$

$$m_{ji} = f_l (w_i - w_j) \dots\dots\dots(2.6)$$

Penganut Model Neo-Klasik (dalam Sjafrizal, 2008) beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*).

2.1.3.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

Myrdal dalam Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan

dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Myrdal dalam Jhingan (1993) mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara factor-faktor Baik non ekonomi maupun ekonomi.

Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan, 1993).

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 1993). Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993).

2.1.3.3 Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada pula daerah yang tingkat pertumbuhannya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata (Sihombing, 2008). Montgomery dalam Mudrajad Kuncoro (2002) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi. Menurut Robinson Tarigan (2007), keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*.

Economic of scale adalah keuntungan karena dapat memproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan

lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

2.1.3.4 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004).

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

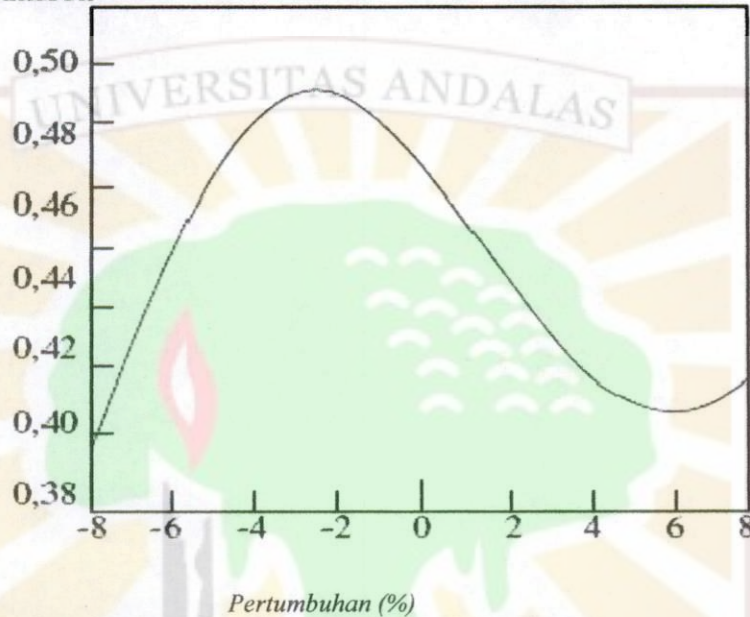
Dua Faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional (Todaro, 2004).

Sebelumnya Hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro pada Kabupaten Banyumas. Pada penelitannya Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan dan melihat hubungannya terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas.

Gambar 2.1

**Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson Dengan Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Banyumas, 1994-2000**

Indeks Williamson



Sumber : Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003)

Hasil dari penelitian Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, dimana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Pada akhirnya analisis kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut,

sehingga terjadilah kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya.

Kritik utama terhadap kurva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitif terhadap ukuran *inequality* dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.

2.1.4 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah

menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan factor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu indeks Williamson, indeks Entrophy Theil dan Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB per Kapita Relatif.

2.1.4.1 Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2008):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \dots \dots \dots (2.7)$$

Dimana :

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

2.1.4.2 Konsep PDRB per Kapita Relatif

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus :

$$RD_{it} = \left| \frac{PDRB \text{ Per kapita } i,t}{PDB \text{ Per Kapita } Nal,t} - 1 \right| \dots \dots \dots (2.9)$$

dimana :

RD_{it} = Ketimpangan wilayah Propinsi i , tahun t

PDRB per kapita $y_{i,t}$ = PDRB per kapita pada Propinsi i pada tahun t

PDB per kapita Nal,t = PDB per kapita Indonesia pada tahun t

2.1.5 Hubungan antara PDRB per kapita dan Ketimpangan Pembangunan

Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari penambahan penduduk (Arsyad, 1997). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak.

Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik.

Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata

diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan.

Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Kuncoro, 2006).

2.1.6 Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan. Menurut Myrdal dalam Jhingan (1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan.

Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008).

Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

2.1.7 Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan wilayah

Sjafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik (Sjafrizal, 2008).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bonet (2006), dimana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapatan regional. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antara aglomerasi

produksi dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.

2.1.8 Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan

Pembangunan Wilayah

Semenjak ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah memiliki dominasi terhadap usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Sjafrizal (2008) menguraikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya

kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan.

Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi. Penelitiannya sebelumnya telah dilakukan oleh Vibiz Regional Research (2008) mengenai efektifitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan indeks Williamson, ketimpangan pada ke-33 Propinsi di Indonesia semakin tinggi setelah adanya desentralisasi (Bonet 2006) juga pernah meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan wilayah dengan bukti pengalaman dari negara Kolombia.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bonet membuktikan bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional. Akan tetapi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessmann (2006) yang menganalisis mengenai "Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional : Menggunakan Pendekatan Data Panel Pada Negara-Negara OECD". Dalam penelitiannya Lessmann menemukan bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi, wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di

Kabupaten Banyumas oleh Sutarno dan Kuncoro, Mudarad 1993-2000

Pada penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan tipologi kelas, daerah/kecamatan di kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal.

Pada periode pengamatan 1993-2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993-2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

2.2.2 Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah oleh Hartono, Budiantoro

Pada penelitian ini Hartono menemukan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Propinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 dimana pada rentan tahun tersebut menunjukkan ketimpangan semakin melebar. Nilai investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan alokasi bantuan pembangunan daerah berpengaruh terhadap

ketimpangan pembangunan perkapita ekonomi di Propinsi Jawa Tengah baik secara parsial maupun simultan.

Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan kesempatan kerja baru dapat mengurangi ketimpangan. Hal ini karena penyerapan angkatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Alokasi dana bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang tidak merata dan daerah yang mendapat bantuan terlalu besar dapat meningkatkan tingkat ketimpangan antar daerah. Hal ini akibat pembangunan yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang masih tertinggal, karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari daerah yang lebih maju.

2.2.3 Desentralisasi fiskal dan disparitas Regional : Pendekatan Panel data untuk “OECD Countries” oleh Lessmann, Christian

Dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi berhubungan kuat dengan rendahnya ketimpangan regional. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitu sebaliknya. Jadi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pembangunan berhubungan negatif.

2.2.4 Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Pendapatan Regional : Bukti dari pengalaman Kolombia Oleh Bonet, Jaime

Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini

terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), investasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional.

2.2.5 Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia oleh Wijayanti, Diana 2001

Pada penelitian ini Diana Wijayanti menemukan hasil perhitungan kesenjangan dengan menggunakan indeks Theil selama periode 1992-2000, cenderung terjadi pola penurunan kesenjangan regional. Tingkat kesenjangan terendah terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi kesenjangan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa semua variabel secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita kecuali modal.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan wilayah juga merupakan masalah yang belum dapat dihapuskan pada di Indonesia. Di Indonesia sebagai negara NSB tingkat ketimpangan wilayah tinggi tahun 1995-2000 salah satunya terdapat di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah.

Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk masuk.

Seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam Jhingan (1993) ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang mementingkan motif laba. Dimana wilayah yang memiliki harapan laba tinggi akan lebih berkembang pesat karena mendorong banyaknya investasi yang masuk. Hal ini secara tidak langsung merugikan wilayah-wilayah terbelakang. Perbedaan yang terjadi ini akan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi berupa aglomerasi belakangan ini banyak diterapkan oleh wilayah-wilayah termasuk Sumatera Barat. Adanya aglomerasi diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang didapat.

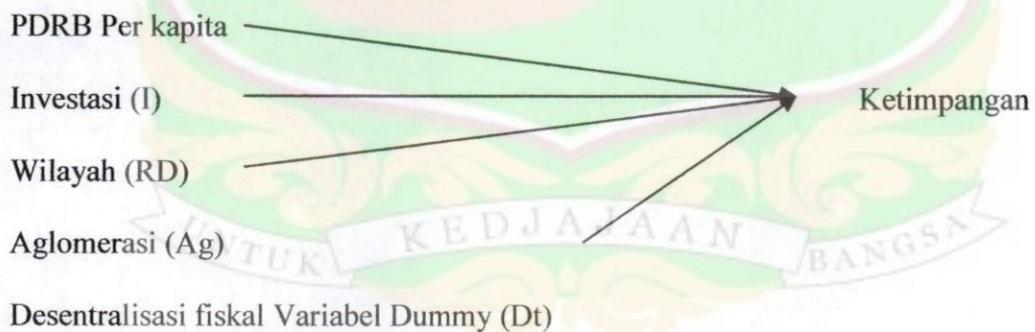
Akan tetapi aglomerasi memiliki dampak yang kurang baik bagi ketimpangan wilayah. Dimana wilayah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan semakin terbelakang. Oleh karena itu, aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan

wilayah. Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah.

Kebijakan ini berupa penetapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada dasarnya penetapan kebijakan ini bertujuan baik karena daerah dapat dengan semaksimal mungkin untuk melakukan aktifitas pembangunan daerahnya. Selain itu, berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Kebijakan ini juga memaksa setiap daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap wilayahnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dijadikan variabel dummy untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Sjafrizal, 2008 dimodifikasi

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah
- b. Diduga terdapat hubungan positif antara investasi dengan ketimpangan wilayah
- c. Diduga terdapat hubungan positif antara Aglomerasi dengan ketimpangan wilayah
- d. Diduga terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan wilayah (RD). Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, investasi (I), aglomerasi (Ag) dan *dummy time* (Dt) sebagai variabel boneka untuk kebijakan desentralisasi fiskal.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

A. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (RD)

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) dan Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Dalam tulisan ini ketimpangan pembangunan merupakan variabel terikat (*dependent variabel*). Adapun rumus dari pendekatan PDRB per kapita relatif untuk mengukur ketimpangan pembangunan adalah sebagai berikut:

$$RD_{it} = \left| \frac{PDRB_{p.c_{it}}}{PDB_{p.c_{Nal,t}}} - 1 \right| \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

RD_{it} = Ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat

PDRB p.c_{it} = PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sumatera Barat (Rupiah)

PDB p.c_{Nal,t} = PDB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia (Rupiah)

B. PDRB Per kapita

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik, PDRB per kapita merupakan variabel yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Dalam tulisan ini PDRB perkapita merupakan variabel bebas (*independent variabel*). Adapun cara mengukur PDRB per kapita suatu wilayah yaitu :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \dots\dots\dots (3.2)$$

Di mana :

PDRB_i = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sumatera Barat (Rupiah)

Jumlah Penduduk_i = Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Barat (Jiwa)

C. Investasi

Investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri). Data Investasi yang digunakan adalah PMA dan PMDN di Propinsi Sumatera Barat yang telah direalisasi menurut lokasi bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan satuan rupiah. Dalam tulisan ini variabel investasi digunakan sebagai variabel bebas (*independent variabel*).

D. Aglomerasi (Ag)

Variabel bebas (*independent* variabel) berikutnya yang digunakan dalam tulisan ini adalah Aglomerasi. Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari *Share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$Ag = \frac{PDRB_i}{PDRB_{tot}} \dots\dots\dots(3.3)$$

Di mana :

Ag = Aglomerasi produksi

PDRB_i = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sumatera Barat (Rupiah)

PDRB_{tot} = Total PDRB atau PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia (Rupiah)

E. *Dummy Time*

Dalam semua model regresi, variabel tak bebas Y dan variable penjelas X bersifat bilangan kuantitatif. Namun hal ini tak selalu berlaku, dan ada kalanya variabel-variabel penjelas bisa bersifat kualitatif. Variabel kualitatif ini sering dikenal dengan variabel buatan atau variabel dummy atau variabel boneka (Gujarati,2006). Variabel dummy ini ditunjukkan dengan angka 0 dan 1, dimana atribut 0 menunjukan sebelum desentralisasi fiskal dan atribut 1 menunjukan setelah desentralisasi fiskal. Penggunaan *dummy time* dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terjadi

perbedaan ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal.

3.2 Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Dajan (1991) yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Definisi lain dari data sekunder menurut Kuncoro (2004) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dalam beberapa terbitan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni perhitungan tingkat ketimpangan wilayah menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif.

Sedangkan analisis regresi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua yaitu pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Propinsi Sumatera Barat.

3.4.1 Analisis Regresi

Analisis regresi ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari faktor PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Pada penelitian ini, analisis regresi dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan Program Eviews 6.0. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data *time-series*. Adapun model persamaannya sebagai berikut (metoda Myrdal dan Sjafrizal) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; = 1,2,\dots, T \dots\dots\dots(3.5)$$

Di mana T adalah banyak data *time-series*.

3.4.2 Estimasi Model regresi

Analisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, inmigran, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah menggunakan data *timeseries* selama 14 (empat belas) tahun yang diwakili data tahunan dari 1995-2008 yang menghasilkan 14 observasi. Model dasar ketimpangan wilayah dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$RD = f(\text{PDRB per kapita}, I, Ag) \dots\dots\dots(3.6)$$

Di mana :

RD = ketimpangan wilayah (*regional disparity*)

PDRB per kapita = Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000

I = Investasi (*Investment*)

Ag = Aglomerasi (*Aglomeration*)

Model dasar tersebut akan diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut :

$$RD_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{PDRB per kapita}_t + \alpha_3 I_t + \alpha_4 Ag_t + \varepsilon_t \dots\dots(3.7)$$

Di mana t menunjukkan *time series* (periode waktu).

Dalam Sjafrizal (2008) dijelaskan karena hubungan antara ketimpangan wilayah dengan tingkat ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi tidaklah linear, maka persamaan regresi dapat pula dilakukan dalam bentuk fungsi non linear. Dengan demikian persamaan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penentu ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut :

$$RD = \alpha_1 \text{PDRB per kapita}^{\alpha_2} I^{\alpha_3} Ag^{\alpha_4} \dots\dots\dots(3.8)$$

Persamaan ini akan dapat dihitung dengan metode regresi setelah dilakukan transformasi dengan menggunakan logaritma sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Log } RD_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{Log PDRB per kapita}_t + \alpha_3 \text{Log } I_t + \alpha_4 \text{Log } Ag_t + \varepsilon_t \dots(3.9)$$

Penelitian ini menggunakan variabel *dummy time* untuk melihat perbedaan ketimpangan pembangunan wilayah di Propinsi Sumatera Barat sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Setelah memasukan variabel *dummy time*

ke dalam persamaan (3.8) maka model persamaan ketimpangan wilayah (RD) adalah sebagai berikut :

$$\text{Log RD}_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{ Log PDRB per kapita}_t + \alpha_3 \text{ Log I}_t + \alpha_4 \text{ Log Ag}_t + \beta_1 D_t + \varepsilon_t \dots (3.10)$$

Di mana :

| | |
|-----------------------|---|
| RD | = Ketimpangan wilayah (<i>Regional Disparity</i>) |
| PDRB per kapita | = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita |
| I | = Investasi (<i>Investment</i>) |
| Ag | = Aglomerasi (<i>Agglomeration</i>) |
| D_t | = <i>Dummy time</i> desentralisasi fiskal Atribut 0, sebelum desentraliasai fiskal |
| α_1 | = Intersep |
| $\alpha_1 - \alpha_5$ | = Koefisien Variabel bebas |
| β_1 | = Koefisien <i>dummy time</i> |
| ε | = Variabel gangguan (<i>error term</i>) |
| T | = Waktu (<i>data time-series</i> , periode 1995-2008) |

3.4.3 Pengujian Statistik (Damodar Gujarati, 2003)

3.4.3.1 Uji koefisien determinasi (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2} \dots \dots \dots (3.11)$$

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

3.4.3.2 Uji t-statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model secara terpisah mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas untuk tingkat kepercayaan = α dan $df = n - k$ dengan hipotesa:

H_0 : variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas

H_1 : variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas

Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima artinya variabel bebas secara terpisah tidak mempengaruhi variabel tidak bebas.

Jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak artinya variabel bebas secara terpisah berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

3.4.3.3 Uji F- statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas dengan hipotesis:

H_0 : semua variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel tidak bebas.

H_1 : semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas.

Dengan tingkat keyakinan= α dan $df = (k-1) (N-k)$

H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$

H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$

3.4.3.4 Uji Durbin-Watson (D-W)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Jika nilai D-W statistik berada pada daerah yang tidak meyakinkan (no- decision) maka harus dilakukan pengujian Run (Run-test). Pengujian dengan uji D-W adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : ada autokorelasi

Dengan menerapkan H_0 di kedua ujung, yaitu bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif jika:

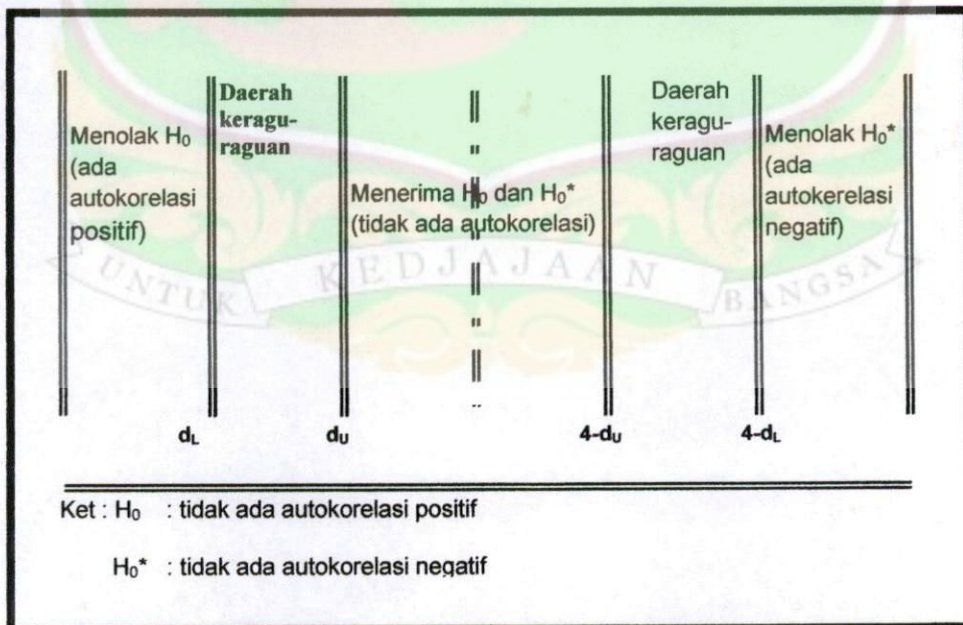
$DW_{\text{-stat}} < d_L$: H_0 ditolak

$d_L < DW_{\text{-stat}} < d_U$: tidak meyakinkan

$DW_{\text{-stat}} > 4-d_L$: H_0 ditolak

$4-d_U < DW_{\text{-stat}} < 4-d_L$: tidak meyakinkan

$d_U < DW_{\text{-stat}} < 4-d_U$: H_0 diterima



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas hasil-hasil pembahasan mengenai analisis deskriptif dari masing-masing variabel, dan analisis dari pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dan otonomi daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di propinsi Sumatera Barat. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini selanjutnya diberi notasi sebagai berikut : variabel PDRB per kapita (*PDRBkap*), investasi swasta (*I*), aglomerasi (*Ag*) dan variabel otonomi daerah (*Di*). Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) yang digunakan adalah ketimpangan Wilayah yang dihitung dengan menggunakan pengukuran PDRB per kapita relative (*Bonet, 2006*), diberi notasi (*RD*).

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Munculnya studi Williamson (1965), telah mendorong pula beberapa ahli untuk melakukan studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah Indonesia. Studi pertama dilakukan oleh Hendra Esmara (1975) yang menggunakan *Williamson Index* sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah. Dimana pada penelitian beliau ditemukan diluar Propinsi penghasil migas (Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah) secara umum kesenjangan antar daerah jauh lebih rendah dibanding jika termasuk daerah penghasil migas. Untuk mempertajam analisa, kalkulasi indeks ketimpangan disini dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun

demikian, karena ketersediaan data tentang Pendapatan Regional di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan pada analisa juga masih terbatas sehingga generalisasi untuk mendapatkan kesimpulan umum masih sulit dilakukan. Pada studi ini, ketimpangan yang dimaksud adalah antar propinsi. Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang.

Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih unggul atau maju dibandingkan daerah lainnya. Ketimpangan biasanya terjadi antara lain ketimpangan regional yang meliputi ketimpangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), ketimpangan antar daerah, dan ketimpangan intra daerah. Pada penelitian ini cakupan objek penelitian adalah ketimpangan antar daerah (Alisjahbana, 2005). Menurut Alisjahbana (2005) ketimpangan atau kesenjangan antar daerah di propinsi-propinsi terjadi karena konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 4.1 Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah Propinsi

Sumatera Barat Tahun 1995-2008

| Tahun | Indeks Ketimpangan Pembangunan di Sumbar (RD) |
|-------|---|
| 1995 | 0,319 |
| 1996 | 0,318 |
| 1997 | 0,314 |
| 1998 | 0,263 |
| 1999 | 0,261 |
| 2000 | 0,201 |
| 2001 | 0,191 |
| 2002 | 0,205 |
| 2003 | 0,206 |
| 2004 | 0,204 |
| 2005 | 0,220 |
| 2006 | 0,194 |
| 2007 | 0,195 |
| 2008 | 0,193 |

Sumber : BPS, diolah

Dari tabel 4.1 diatas ketimpangan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat tidak terlalu tinggi. Tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 0,319 dan terendah terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 0,193. Jika dilihat dari tahun 1995-2008 angka indeks ketimpangan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat terus menerus menurun antar waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat belum terlalu tinggi, ini mungkin diakibatkan ternyata di Propinsi Sumatera Barat belum terjadi perbedaan struktur perekonomian daerah yang begitu dominan dan pertumbuhan ekonomi masih merata dirasakan sebagian besar penduduk Propinsi Sumatera Barat.

4.1.2 PDRB Per kapita

Menurut BPS (2008) Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB perkapita) adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB perkapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Bila dilihat dari tabel 4.2 mengenai Laju pertumbuhan PDRB per kapita di Sumatera Barat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB perkapita cenderung lebih rendah dari laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat. Pada tahun 1998 dan 1999 PDRB Per kapita mengalami penurunan angka yang cukup tinggi yang diakibatkan oleh dampak terhadap krisis ekonomi pada waktu itu di Indonesia, yakni sebesar -7,19% pada tahun 1998 dan 0,05% pada tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2000 Laju pertumbuhan PDRB per kapita Sumatera Barat mencapai angka tertinggi selama 14 tahun terakhir yakni sebesar 11,76%. Ini merupakan masa peralihan menuju kegiatan ekonomi yang lebih baik dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 tersebut.

Akan tetapi jika dilihat dari tahun 2001 sampai tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB perkapita Sumatera Barat masih lebih rendah dari laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat. Ini menandakan bahwa masih terjadi ketimpangan di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut juga meningkat. Selain itu, tingkat pertumbuhan

ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk (Todaro, 2004).

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita dan PDRB Propinsi Sumatera

Barat Tahun 1995-2008 Berdasarkan Harga Konstan 2000

| Tahun | Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita | Laju Pertumbuhan PDRB |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 1995 | 7.37 | 8.93 |
| 1996 | 6.3 | 7.82 |
| 1997 | 3.69 | 5.14 |
| 1998 | -7.19 | -6.73 |
| 1999 | 0.05 | 1.59 |
| 2000 | 11.76 | 3.85 |
| 2001 | 3.31 | 3.66 |
| 2002 | 1.33 | 4.69 |
| 2003 | 3.33 | 5.26 |
| 2004 | 3.81 | 5.47 |
| 2005 | 4 | 5.73 |
| 2006 | 5.49 | 6.14 |
| 2007 | 4.86 | 6.34 |
| 2008 | 4.91 | 6.37 |

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Jika dilihat dari gambar 4.1 menggambarkan fluktuasi PDRB perkapita di Propinsi Sumatera Barat cenderung relatif meningkat. Pada tahun 1998 PDRB perkapita ini sempat menurun dikarenakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Penurunan ini cukup rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah Rp. 5.226.104,27 menjadi Rp. 4.850.364,543 pada tahun 1998. Ini terjadi karena saat krisis terjadi di Indonesia membuat sektor riil tidak dapat bekerja secara optimal sehingga output yang dihasilkan pun menurun. Penurunan ini

tidak hanya berdampak pada Indonesia saja, tetapi berdampak pula pada propinsi-propinsi di dalamnya termasuk Sumatera Barat. Hal ini tidak berlangsung lama, karena untuk tahun-tahun selanjutnya PDRB perkapita Sumatera Barat kembali meningkat dan mencapai angka Rp. 7.349.727,685 pada tahun 2008.



4.1.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Investasi yang masuk baik dari pemerintah maupun pihak swasta dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 4.3
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) Propinsi Sumatera Barat Berdasarkan Realisasi Tahun 1995-2008

| Tahun | PMA | PMDN |
|-------|-------------------|-----------------|
| 1995 | 92.082.719.280 | 256.046.800.000 |
| 1996 | 71.709.816.720 | 204.090.910.000 |
| 1997 | 157.619.452.880 | 421.169.810.000 |
| 1998 | - | 685.383.230.000 |
| 1999 | 566.049.289.500 | 348.030.020.000 |
| 2000 | 569.411.167.200 | 187.773.150.000 |
| 2001 | 1.118.945.256.000 | 183.978.140.000 |
| 2002 | 1.059.853.449.600 | 348.234.000.000 |
| 2003 | 248.362.168.850 | 204.464.890.000 |
| 2004 | 274.358.225.600 | 631.733.330.000 |
| 2005 | 841.142.385.300 | 607.061.370.000 |
| 2006 | 788.561.774.000 | 234.856.820.000 |
| 2007 | 66.203.890.440 | 58.511.100.000 |
| 2008 | 225.858.204.000 | 608.917.890.000 |

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal diolah

Tabel 4.3 di atas ini menunjukkan bahwa pada tahun 1995-1997 jumlah PMA yang masuk ke Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 1998 tidak ada investor yang berani untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi, ini jelas merupakan dampak krisis perekonomian berada pada kondisi yang tidak stabil pada waktu tersebut. Akan tetapi seiring dengan perbaikan perekonomian setelah terjadinya krisis tersebut, kembali meningkatkan jumlah investasi swasta.

Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah PMA pada tahun 1999-2002. Yang terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai sebesar Rp. 1.118.945.256.000. Dan setelah itu bergerak fluktuatif seiring krisis dan kurangnya peran pemerintah dalam mendukung penyediaan fasilitas pembangunan dan peng-optimalan sumber daya di Sumatera Barat. Sedangkan jumlah PMDN memang tidak sebesar jumlah PMA yang masuk pada wilayah ini dan cenderung fluktuatif.

4.1.4 Aglomerasi

Aglomerasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Menurut Marshall dalam Kuncoro (2004), aglomerasi muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut.

Aglomerasi di Propinsi Sumatera Barat masih belum cukup tinggi, dimana aglomerasi pada wilayah tertentu nantinya akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Karena dengan adanya aglomerasi akan membuat terkonsentrasinya

kegiatan perekonomian pada wilayah tersebut dan dimana akan menghemat biaya produksi sehingga akan lebih menguntungkan bagi industri-industri yang terkait di daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.4

**Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun
1995-2008**

| Tahun | Aglomerasi | Ketimpangan Wilayah |
|-------|-------------|---------------------|
| 1995 | 0,015166177 | 0,319 |
| 1996 | 0,01516618 | 0,318 |
| 1997 | 0,01523003 | 0,314 |
| 1998 | 0,016351073 | 0,263 |
| 1999 | 0,016480483 | 0,261 |
| 2000 | 0,016311974 | 0,201 |
| 2001 | 0,016344994 | 0,191 |
| 2002 | 0,016502696 | 0,205 |
| 2003 | 0,01657829 | 0,206 |
| 2004 | 0,016648236 | 0,204 |
| 2005 | 0,016654756 | 0,220 |
| 2006 | 0,009268615 | 0,194 |
| 2007 | 0,008333832 | 0,195 |
| 2008 | 0,007066554 | 0,193 |

Sumber : data diolah

Jika dilihat pada tabel 4.4 di atas selama masa penelitian tingkat aglomerasi tertinggi di Sumatera Barat terjadi pada tahun 2005 sebesar 0,16654756 persen dan terendah pada tahun 2008 sebesar 0,007066554 persen. Wilayah yang memiliki kekuatan aglomerasi yang tinggi akan mendorong pembangunan wilayah tersebut melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, bagi wilayah lain yang aglomerasinya relatif rendah akan mendorong munculnya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, adanya aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah.

4.2 Analisis Regresi

Hasil temuan atau hasil perhitungan dengan menggunakan teknik perhitungan koefisien regresi linear berganda dan ditransformasikan kedalam bentuk logaritma. Untuk menguji pengaruh dari PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dan otonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat, penulis menggunakan analisis regresi. Model dasar dari persamaan estimasi *Ordinary Least Square (OLS)* akan digunakan untuk menaksir variabel dependen berdasarkan Regresi

Setelah dilakukan regresi terhadap data, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$\text{Log } RD_i = 0.908299 - 0.090834 \text{Log}(PDRB_{kap_i}) + 0.003009 \text{Log}(I_i) -$$

$$(3.885579) \quad * \quad (-2.806563)** \quad (0.661275)$$

$$12.02247 \text{Log}(Ag_i) + 0.017987 \text{Log}(DT_i)$$

$$(-2.292416)** \quad (0.483734)$$

* signifikan pada 1%

** signifikan pada 5%

$$R^2 = 0.709518$$

$$F\text{-statistic} = 5.495734$$

4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.709518 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PDRB per kapita, investasi swasta, aglomerasi dan otonomi daerah mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 70,95% dan sisanya 29,05% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel-variabel independen diatas.

4.2.2 F- Test Statistic

Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan begitu sebaliknya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5.495734 sedangkan nilai F_{tabel} dihitung dengan cara $df1 = k-1$, dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah jumlah data sehingga didapatkan nilai $F_{tabel(4;9)}$ sebesar 3.63. Hal ini menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan bisa dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan) ketimpangan wilayah dipengaruhi oleh PDRB per kapita, investasi swasta, aglomerasi dan otonomi daerah.

4.2.3 T-test statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap.

Variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, dan begitu juga sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen jika $T_{hitung} < T_{tabel}$.

Dari hasil regresi diperoleh nilai $T_{hit} PDRBkap = -2.80656$, $T_{hit} I = -0.66128$, $T_{hit} Ag = -2.29242$ dan $T_{hit} Dt = 0.48373$ sedangkan T_{tabel} dihitung dengan cara $T_{tabel} : t a : n-k$, sehingga didapatkan nilai T_{tabel} sebesar 2.262.

Tabel 4.5
Uji t -statistic

| Variabel | Koefisien | Std. error | t-stat | Probability | Signifikan |
|----------------|-----------|------------|----------|-------------|------------------------------|
| PDRBkap | -0.90834 | 0.032365 | -2.80656 | 0.0205 | Signifikan pada $\alpha=5\%$ |
| I | 0.00309 | 0.004550 | -0.66128 | 0.5250 | Tdk signifikan |
| Ag | -12.02247 | 5.244453 | -2.29242 | 0.0476 | Signifikan pada $\alpha=5\%$ |
| DT | 0.017987 | 0.037183 | 0.48373 | 0.6401 | Tdk signifikan |

Sumber : data diolah

Untuk dapat melihat pengaruh variabel secara parsial dapat juga dilihat dari nilai probabilitas. Dengan menguji dua sisi maka nilai probabilitas tidak perlu dibagi dua karena nilai probabilitasnya lebih dari tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan pada

tingkat kepercayaan 5% karena nilai probabilitasnya sebesar 0.0205. Variabel investasi swasta berpengaruh tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 1%,5%, maupun 10% dengan nilai probabilitas sebesar 0.5250. Sementara variabel aglomerasi berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 5% dengan nilai probabilitas sebesar 0.0476, dan terakhir variabel dummy time otonomi daerah berpengaruh tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 10% dengan probabilitasnya 0.6401.

4.2.4 PDRB Perkapita

Variabel PDRB per kapita (*PDRBkap*) mempunyai hubungan negatif terhadap ketimpangan wilayah dengan koefisien regresi -0.090834, artinya dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan, maka PDRB per kapita akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, dan koefisien regresi sebesar 0.090834 artinya yaitu kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 rupiah akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.090834 unit. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih merata, dapat dinikmati hampir sebagian besar penduduk.

4.2.5 Kondisi Investasi

Sedangkan variabel investasi swasta (*I*) mempunyai hubungan positif terhadap ketimpangan wilayah, koefisien regresinya sebesar 0.003009, artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan maka investasi akan berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Dan koefisien regresi sebesar 0.003009 mempunyai arti bahwa kenaikan investasi sebesar 1 rupiah akan

menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 0.003009 unit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di propinsi Sumatera Barat belum merata dan optimal. Kegiatan investasi yang dilakukan dapat menimbulkan ketimpangan wilayah karena belum dapat menyerap tenaga kerja yang optimal, sehingga hanya sebagian penduduk yang merasakan hasil dari investasi yang dilakukan.

4.2.6 Aglomerasi

Sedangkan variabel aglomerasi (Ag) mempunyai hubungan yang negatif terhadap ketimpangan wilayah, koefisien regresinya sebesar -12.02247, artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan maka aglomerasi akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Dan koefisien regresi sebesar -12.02247 mempunyai arti bahwa kenaikan aglomerasi sebesar 1 rupiah akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar -12.02247 unit.

4.2.7 Dummy Time Otonomi Daerah

Dummy time desentralisasi fiskal (Dt) dalam penelitian dipilih untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah ditetapkannya kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang

dapat digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Variabel *dummy* dituliskan dengan angka 0 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sebelum desentralisasi fiskal dan angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan setelah desentralisasi fiskal. Hasil regresi menunjukkan bahwa *dummy* desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tingkat ketimpangan di Propinsi Sumatera Barat baik sebelum dan setelah desentralisasi fiskal.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear antara beberapa atau semua variabel penjelas dalam suatu model regresi. Menurut Frisch, 1934, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan, sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Jika menginginkan model yang bersifat BLUE, maka tidak boleh terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini adalah dengan

menggunakan *Correlation Matrix* (r) masing-masing variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Uji Multikolineritas

| | <i>PDRBkap</i> | <i>I</i> | <i>AG</i> | <i>DT</i> |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>PDRBkap</i> | 1.000000 | -0.101931 | -0.771295 | 0.819916 |
| <i>I</i> | -0.101931 | 1.000000 | 0.385822 | 0.154469 |
| <i>AG</i> | -0.771295 | 0.385822 | 1.000000 | -0.431202 |
| <i>DT</i> | 0.819916 | 0.154469 | -0.431202 | 1.000000 |

Sumber : Data diolah

Model dinyatakan terjadi multikolinearitas jika r (*absolute*) $> 0,85$ (Widarjono, 2005). Dari tabel terlihat bahwa diantara variabel independen tidak terdapat nilai r yang besar dari 0,85 sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2 Uji *Heteroskedastisitas*

Untuk menguji ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* (variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan) yaitu dengan menggunakan uji *white heterokedasticity no cross term* dimana jika *chi-squared probability* ($Obs * R^2$) > 0.05 berarti tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Hasil Uji *Heterikedastisitas* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7

Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

| | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| F-statistic | 1.666357 | Probability | 0.275279 |
| Obs*R-squared | 9.244700 | Probability | 0.235562 |

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa probability (Obs R squared) lebih besar ($0.268201 > 0.05$) sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi heterokedastisitas.

4.3.3 Data Terdistribusi Normal

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dari nilai probabilitas *J-B statistic*. Data yang terdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai probabilitas *J-B statistic* yang lebih besar dari 0.05 (pada alpha 5%) (Sriwinarti, 2004). Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas *J-B statistic* sebesar 1.020581 yang lebih besar dari 0.05, berarti menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Masalah *autokorelasi* terjadi karena adanya hubungan antara *error terms*. Secara harfiah, *autokorelasi* berarti adanya korelasi antara satu variabel pengganggu dengan variabel pengganggu lainnya (Widarjono, 2005). Dalam konteks regresi, apabila faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya.

Oleh karena itu, bila pengamatan-pengamatan yang dilakukan sepanjang waktu, pengaruh faktor pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu tidak terbawa pada periode berikutnya. Ini dinamakan tidak ada *autokorelasi*. Adanya korelasi antara variabel gangguan mengakibatkan penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar.

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan metode uji *Durbin-Watson*. Untuk mendeteksi autokorelasi, *Durbin-Watson* telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembanding uji *Durbin-Watson* yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat, ada atau tidak ada autokorelasi. Dalam membandingkan hasil penghitungan statistik *DW* dengan tabel *DW*, telah mempunyai aturan tersendiri.

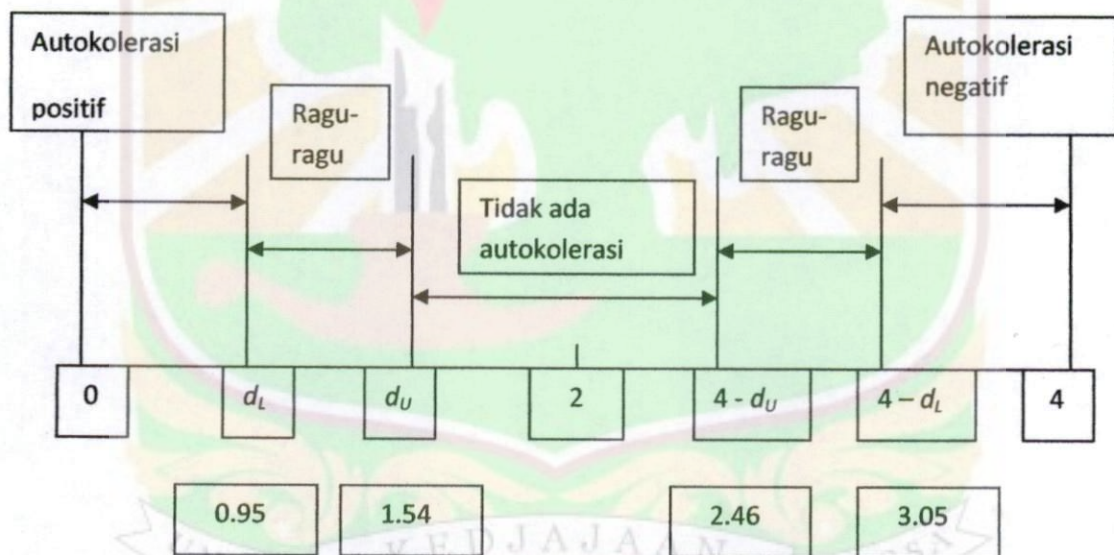
Tabel *DW* terdiri atas 2 nilai, yaitu batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U). nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji *DW*, dengan aturan sebagai berikut :

- a. Bila $DW < d_L$; berarti ada korelasi positif atau kecenderungannya $\rho = 1$.
- b. Bila $d_L \leq DW \leq d_U$; kita tidak dapat mengambil keputusan apa-apa.

- c. Bila $d_U < DW < 4 - d_U$; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif.
- d. Bila $4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$; kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- e. Bila $DW > 4 - d_L$; berarti ada korelasi negatif.

Dari hasil regresi didapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.872473 dan dari tabel *Durbin Watson* didapatkan nilai $d_L = 0.95$ dan nilai $d_U = 1.54$ sehingga nilai $(4 - d_U) = 2.46$ dan nilai $(4 - d_L) = 3.05$. dari aturan *DW* diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa $d_U < DW < 4 - d_U$, atau $1.54 < 1.96 < 2.46$, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model estimasi tidak mempunyai korelasi positif maupun negatif.

Ada atau tidaknya autokolerasi juga dapat dilihat dari bagan dibawah ini :



Dari bagan diatas diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (1,872473) terletak pada daerah tidak terdapat autokolerasi. Sehingga bisa dinyatakan bahwa model hasil estimasi bebas terkena masalah autokolerasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Ketimpangan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat diukur dengan menggunakan Pendekatan PDRB perkapita relatif selama periode penelitian tahun 1995-2008 dapat dikatakan tidak terlalu tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pemerataan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat, dimana distribusi pembangunan antar daerah hampir merata di Propinsi Sumatera Barat.
2. Model regresi pengaruh PDRB perkapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat tahun 1995-2008 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
4. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat tahun 1995-2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0.709518. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 70,95 persen variasi variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijelaskan

dengan baik oleh variabel-variabel independen yakni PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal.

5. Uji F-statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi yaitu PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi serta *dummy time* desentralisasi fiskal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen ketimpangan wilayah .
6. Dari hasil regresi PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar -0.090834 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat sebesar 0.090834 persen. Pengaruh negatif ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat yang diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Sehingga pendapatan perkapita masyarakat dapat terdistribusi secara merata.
7. Variabel independen kedua yaitu investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0.003009. Hal ini berarti kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat sebesar 0.003009 persen. Peningkatan investasi yang terjadi di Sumatera Barat membuat kegiatan ekonomi semakin tumbuh namun belum merata.
8. Aglomerasi berhubungan negatif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar -12.02247 pada $\alpha = 5\%$, dimana kenaikan tingkat aglomerasi 1 persen akan menurunkan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat sebesar 12.02247 persen. Hal ini dikarenakan dengan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada

suatu wilayah membuat wilayah yang memiliki konsentrasi ekonomi rendah menjadi terbelakang. Sedangkan variabel *dummy time* desentralisasi tidak signifikan, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat ketimpangan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah tahun penelitian yang relative singkat (14 tahun). Selain itu, model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti faktor migrasi, perdagangan, pengangguran dan prasarana perhubungan guna menunjang mobilitas barang dan faktor produksi. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan ketimpangan wilayah.

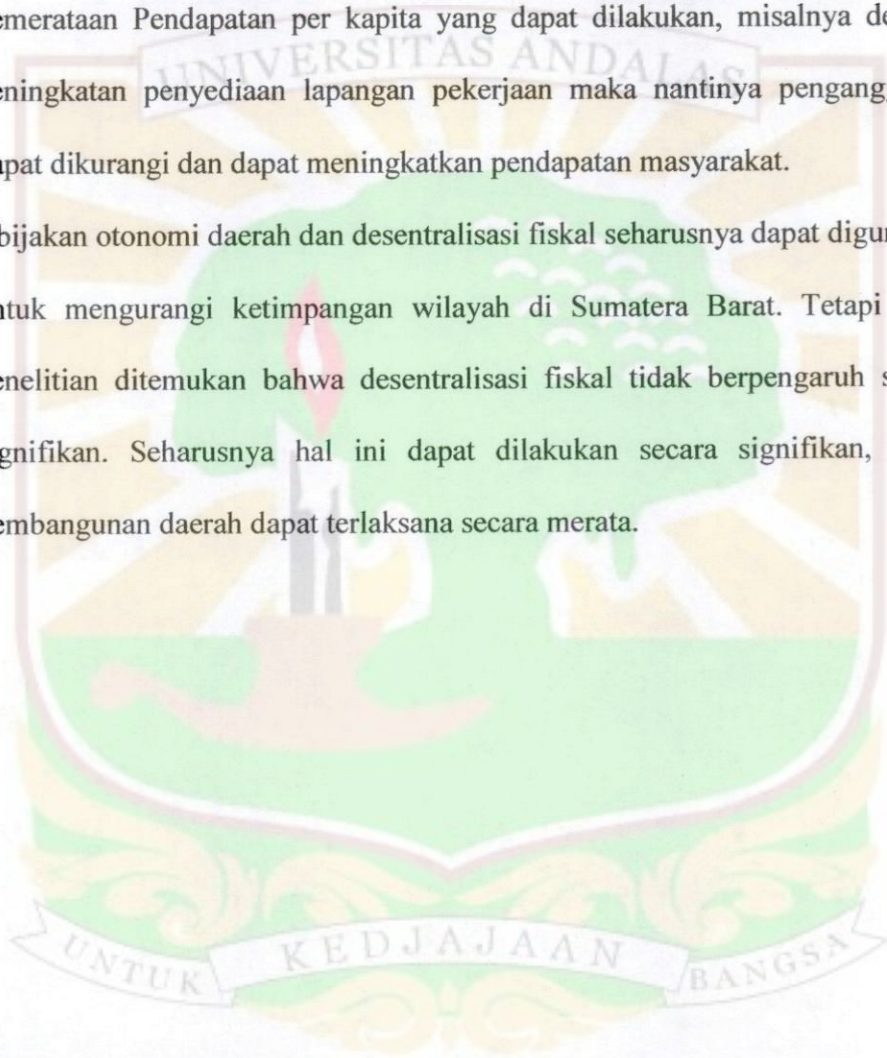
5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, didapatkan tingkat ketimpangan yang cenderung menurun selama periode penelitian. Melihat keadaan tersebut upaya-upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dimulai dari faktor-faktor

yang mempengaruhi semakin tingginya ketimpangan wilayah. Hasil penelitian PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, ini dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita di Propinsi Sumatera Barat hampir merata pada seluruh penduduk, sehingga usaha-usaha untuk pemerataan Pendapatan per kapita yang dapat dilakukan, misalnya dengan peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan maka nantinya pengangguran dapat dikurangi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Tetapi pada penelitian ditemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan. Seharusnya hal ini dapat dilakukan secara signifikan, maka pembangunan daerah dapat terlaksana secara merata.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. Armida. S, *Kesenjangan Regional di Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, 2005.
- Amini. Hidayati dan Kuncoro. Mudrajad, *Konsentrasi Geografis Industri Manufaktur di Greater Jakarta dan Bandung Periode 1980-2000 : Menuju Satu Daerah Aglomerasi*, Diakses Tanggal 20 April 2011 Dari http://www.mudrajad.com/upload/journal_amini-aglomerasi.pdf, 2004.
- Arsyad. Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta Badan Pusat Statistik, 1997.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Data PMA dan PMDN yang Telah Direalisasikan Tahun 1998-2009*, Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumatera Barat, 2009.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.
- Bonet. Jaime, *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from The Colombian Experience*, *Original Paper*, Ann Reg Sci 40:661-676, 2006.
- Ghozali. Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Jhingan. ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Lessmann. Christian, *Fiscal Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Approach for OECD Countries Ifo Working Paper No.25*, 2006.

Kuncoro. Mudrajad, *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta, 2002.

Kuncoro. Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan Teori.Masalah.dan kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta, 2006.

Kuncoro. Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi. Perencanaan. Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

Masli. Lili, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Diakses Tanggal 3 Maret 2011. Dari <http://www.stan-im.ac.id/jsma/pdf/vol1/analisis%20faktor>, 2008.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Sumatera Barat Badan Pusat Statistik.

PMA dan PMDN menurut Lokasi Berbagai Tahun Terbitan, Sumatera Barat.

Sigalingging. Atur J, *Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Undip Semarang, 2008.